

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
UNTUK PENGEMBANGAN DAN PENATAAN PASAR
TRADISIONAL
(STUDY KASUS PADA PASAR PAGI ARENGKA PEKANBARU)**



Oleh:

LINA WATI
10775000303

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIA
2013**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU UNTUK PENGEMBANGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL (STUDY KASUS PADA PASAR PAGI ARENGKA PEKANBARU)

Oleh :

LINA WATI

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Mengenai analisis kebijakan pemerintah untuk pengembangan dan penataan pasar tradisional. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Mei 2013..

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder dengan jumlah sampel sebanyak 74 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Cluster Sampling (di kelompokkan berdasarkan jenis tertentu).

Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan diketahui bahwa sebanyak 32 orang atau sebesar 42,8 % Pedagang Kaki Lima (PKL) menyetakan setuju dengan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional adalah dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, dinas pasar, pedagang kaki lima

Permasalahan-permasalahannya meliputi :

1. Penataan pasar yang tidak beraturan
2. Pelebaran tempat berjualan
3. Kebersihan pasar

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan gejala yang telah dipaparkan diatas, dapatlah dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru sudah efektif ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

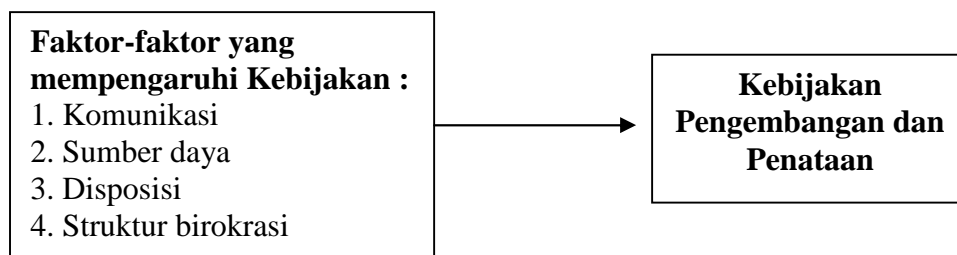
Adapun yang tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru sudah berjalan efektif atau belum.
2. Untuk mengetahui satu kebijakan yang harus diambil Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.

C. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat di buat sebuah kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka berpikir.



Sumber : AG Subarsono, (2005: 90 – 92)

Berdasarkan gambar II.1 di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan pengembangan dan penataan sangat dipengaruhi oleh hubungan komunikasi, sumber daya yang dimiliki, disposisi yang terjadi dan struktur birokrasi yang terjadi harus saling terbina dengan baik.

A. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, perumusan masalah yang diuraikan diatas dan dihubungkan dengan telaah pustaka maka penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru belum efektif.
2. Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru adalah dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

B. Definisi Konsep

Untuk mempermudah serta memperjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengoperasionalkan beberapa konsep yaitu:

1. Kebijakan, adalah suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang tidak dilakukan pemerintah atau yang diusulkan seseorang, sekelompok orang yang memiliki perbedaan dan kesamaan pandangan dalam mempengaruhi keluaran (*out-put*) kebijakan yang diharapkan untuk mencapai tujuan bersama.
2. Pemerintah, adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sivil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang

bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntunan (harapan) yang diperintah

3. Pengembangan, adalah proses kegiatan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas yang dimiliki.
4. Penataan, adalah proses kegiatan untuk memperbaiki, merubah atau menata kembali tempat yang telah ada sehingga lebih baik dan teratur.

C. Konsep Operasional Penelitian

Tabel: II.1 Konsep Operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Kebijakan	Adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi

Sumber : Leo Agustino (2006 : 7).

A. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah unsur Sekretariat Daerah, Camat, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pedagang Sayur, Tokoh Masyarakat yang berjumlah 28 orang dan para Pedagang Sayur, Serikat Pedagang berjumlah 150 orang. Pengambilan sampel dengan menggunakan Metode Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Besar Populasi

e^2 = Tingkat Error 10 % (Persen Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi).

(Counsuelo G. Sevila. Dkk, 1993:161)

$$n = \frac{150}{1 + 150 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{150}{1 + 150 (0,01)}$$

$$n = \frac{150}{1 + 1,50}$$

$$n = \frac{150}{2,50}$$

$$n = 60 \text{ Orang}$$

dengan demikian diketahui bahwa jumlah sampel dari para pedagang pasar sebanyak 60 orang, sedangkan untuk pengambilan jumlah sampel pada bagian aparat pemerintahan dan dinas pasar diambil dengan menggunakan metode *Cluster Sampling* (di kelompokkan berdasarkan jenis tertentu) sebagai berikut:

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Pedagang Pasar Baru Arengka	150	60	40,0%
2	Pegawai	28	14	50,0%
JUMLAH		178	74	90,0%

Sumber: Data Lapangan, 2012

Tabel V.19 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional.

No	Pertanyaan	Frekuensi			
		S	TS	STS	Jumlah
1	Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pengembangan yang akan dilakukan oleh pemerintah	36	24	14	74
		48,6%	32,4%	18,9%	100,0%
2	Apakah bapak /ibu setuju bahwa pengembangan dan penataan akan mempengaruhi jumlah pembeli makin turut meningkat	16	34	24	74
		21,6%	45,9%	32,4%	100,0%
3	Apakah dengan dilakukannya pengembangan dan penataan pasar akan memudahkan masyarakat untuk berbelanja	37	21	16	74
		50,0%	28,4%	21,6%	100,0%
4	Apakah dengan dilakukannya pengembangan dan penataan	52	16	6	74

	pasar akan memudahkan masyarakat untuk berbelanja				
		70,3%	21,6%	8,1%	100,0%
5	Apakah jika dengan dilakukannya pengembangan dan penataan nantinya keindahan dan keteraturan pasar akan terlihat	68	6	0	74
		91,9%	8,1%	0,00%	100,0%
6	lamanya menempati pasar pagi arengka sudah lebih dari 1 tahun	73	4	0	74
		98,6%	5,4%	0,00%	100,0%
7	setujukah bapak/ibu bahwa masyarakat ramai berbelanja di Pasar Arengka ini	46	25	3	74
		62,2%	33,8%	4,1%	100,0%
8	Apakah bapak/ibu setuju bahwa masyarakat lebih sering membeli pada pedagang kaki lima yang ada di depan Pasar Pagi Arengka ini	53	21	0	74
		71,6%	28,4%	0,00%	100,0%
9	Apakah bapak/ibu setuju bahwa keteraturan pasar akan turut berpengaruh dengan pendapatan penjualan	39	21	14	74
		52,7%	28,4%	18,9%	100,0%
10	Apakah bapak/ibu setuju bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah selama ini telah mencukupi	7	47	20	74
		9,5%	63,5%	27,0%	100,0%
11	apakah bapak/ibu setuju bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan kepada pedagang untuk melakukan pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka	11	47	16	74
		14,9%	63,5%	21,6%	100,0%
12	Apakah bapak/ibu setuju bahwa pemerintah daerah mempunyai keinginan untuk melakukan pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka	35	27	12	74
		47,3%	36,5%	16,2%	100,0%

13	Apakah bapak/ibu setuju apabila pemerintah meningkatkan harga beli tempat untuk berjualan	0	17	57	74
		0,0%	23,0%	77,0%	100,0%
14	Apakah bapak/ibu setuju jika pemerintah meminta agar bapak/ibu pindah berjualan dari tempat sekarang ini	0	12	62	74
		0,0%	16,2%	83,8	100,0%
15	Apakah bapak/ibu mempunyai rencana untuk pindah berjualan dari tempat sekarang ini	2	14	58	74
		2,7%	18,9%	78,4%	100,0%
	Jumlah	475	336	302	1.110
	Rata-rata	32	22	20	74
	Persentase	42,8%	30,3%	27,2%	100,0%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.19 tentang Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional diketahui bahwa Sebanyak 32 orang responden atau (42,8 %) responden menyatakan setuju dengan kebijakan pemerintah, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 22 orang responden atau (30,3 %) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 20 orang responden atau (27,2 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional namun harus dibarengi dengan beberapa persyaratan lain seperti pemberian fasilitas dan sarana pra sarana lain dalam berdagang.

2. Faktor –faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar.

Tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru. Penulis dapat menemukan faktor-faktor penghambat penerapan kebijakan tersebut dari kesimpulan wawancara dengan para responden sebagai berikut :

1) Komunikasi

Salah satu cara untuk menciptakan keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada pedagang yang menjadi target atau sasaran kebijakan tersebut harus ditransmisikan dengan baik kepada. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang akan menyebabkan terjadinya kesimpang siuran yang juga akan sangat berdampak terhadap tujuan utama yang di harapkan Pemerintah Pekanbaru sendiri, oleh sebab itu maka dipandang perlu adanya komunikasi yang baik dan tepat kepada pihak tertentu.

Untuk melihat hasil jawaban responden tentang kelancaran penyampaian informasi kepada para pedagang tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan pedagang di Pasar Pagi Arengka di Kota Pekanbaru:

” Sejauh ini kami dari Pemerintah Daerah selalu berusaha untuk menyampaikan informasi penting yang berhubungan dengan Pedagang. Upaya ini kami lakukan agar pedagang mengetahui hak dan kewajibannya dalam berdagang dan tahu arti pentingnya menjaga ketertiban pasar”. **(Wawancara dengan Camat Marpoyan Damai, 5 Juni 2013).**

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat dapat disimpulkan bahwa informasi sudah diberikan secara rutin kepada Pedagang sesuai berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar implementasi sebuah kebijakan yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan baik dan benar. Tanpa adanya sumber daya yang baik, maka sudah dipastikan bahwa implementasi sebuah kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. Inilah salah satu alasan utama tentang pentingnya ketersediaan sumber daya khususnya sumber daya manusia.

Untuk melihat seberapa baik sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru beserta petugas lapangan yang dimilikinya, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut :

” Sumber daya yang ada pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang ada sekarang ini dirasa tidak mencukupi untuk menerapkan kebijakan tersebut, hal ini mengingat luasnya wilayah kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan petugas yang hanya beberapa orang”.
(Wawancara dengan petugas Dinas Pasar Kota Pekanbaru, 5 juni 2013).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa jumlah sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru sangat terbatas sekali, sehingga sulit untuk dapat mengimplementasikan kebijakan pemerintah tersebut.

3) Disposisi

Disposisi yaitu sikap pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat atau motivasi psikologis untuk melaksanakan kebijakan. Apabila implementor

memiliki disposisi yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai motivasi dari implementor untuk mengimplementasikan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

” Biasanya dalam setiap menjalankan tugas kepada para Polisi Pamong Praja, kami selalu memberikan motivasi secara rutin kepada petugas lapangan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab ”.

(Wawancara dengan Kepala Bagian Pasar, 5 Juni 2013).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bagian Pasar dan di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa motivasi selalu diberikan oleh Dinas Pasar kepada para petugas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dilapangan.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standar Operating/SOP*), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor didalam bertindak.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai struktur organisasi dapat dilihat dari hasil wawancara dengan DPRD di Kota Pekanbaru :

” Salah satu prosedur yang kita jalankan dalam bertugas dilapangan adalah dengan menerapkan Standar Opration (SOP) agar anggota kita dapat bekerja dengan baik dan tidak berbuat semena-mena dilapangan”.

(Wawancara dengan Anggota DPRD di Kota Pekanbaru).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standar Operating/SOP*), ini menjadi pedoman bagi setiap anggota kita agar dapat dengan baik dan tidak berbuat semena-mena dilapangan dalam bertindak.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ditujukan kepada Allah SWT atas berkat rahmat penulis sampaikan salawat beriring salam kepada baginda besar Rasullullah SAW yang menjadi pemimpin umat Islam sepanjang masa serta guru bagi semua makhluk di muka bumi ini atas segala ilmu yang telah beliau titiskan untuk umat manusia.

Skripsi ini berjudul “ **Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Pagi Arengka Pekanbaru)**”. Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri SUSKA RIAU.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H.M Nazir Karim selaku Rektor UIN SUSKA Riau
2. Bapak Dr. Mahendra Romus,Sp, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Afrizal, S.SOs, M.Si sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara
4. Bapak Rusdi, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Negara yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu demi kesuksesan mahasiswa.

5. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP.M.Si selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Bapak Kepala Dinas beserta pegawai dan staf yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian dan Bapak Mahyuddin selaku kepala bidang Ketertiban dan Kebersihan beserta staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam mengumpulkan data-data yang penulis perlukan.
8. Teristimewa buat Ayahanda M.zen dan Ibundaku Tini yang telah membesarkan dan memberikan cinta kasih sayang kepada penulis serta selalu mendo'akan penulis dari menjalankan perkuliahan hingga terselesaikan skripsi ini. Semoga Ayahanda dan Ibundaku senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ...
9. Buat ancon, onga, untuo, oncu, udo dan adikku Lidiawati serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
10. Untuk sahabat-sahabatku Neneng, Bela, Dewi, Mega, Fitri, Norma, Ulis, Rian, Iboy, Charles, Aldi, Haris, Azmi, Didik, Deni, yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, dan teman-temanku yang senasib dan seperjuangan khususnya Jurusan Administrasi negara angkatan 2007 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

11. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala yang setimpal.

12. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 Oktober 2013
Penulis,

LINA WATI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era reformasi, di tengah bangsa Indonesia yang terus melakukan perubahan dan pembangunan di segala bidang, nasib pasar tradisional masih merana. Keberadaan pasar tradisional terdesak dengan munculnya pasar modern seperti mall dan minimarket yang berkembang pesat.

Pasar tradisional di seluruh Indonesia, yang mencapai lebih dari 13.450 unit dan mampu menampung lebih dari 12.625.000 pedagang, sebenarnya dapat menjadi kekuatan ekonomi Negara. Roda perekonomian kerakyatan dapat terus bergulir jika pasar-pasar tradisional yang memiliki sejarah panjang di kelola dengan baik dan tetap lestari. Ironisnya hanya sekian persen pasar tradisional yang dikelola secara profesional. Selebihnya, pasar tradisional terkesan jorok, becek, bau dan sumpek.

Sudah sejak lama pasar tradisional memegang peranan penting dalam meggerakkan ekonomi rakyat di seluruh negeri. Dalam era reformasi, terjadi perubahan sistem pemerintahan menjadi otonomi daerah dengan semua keputusan mengenai perizinan hampir 100% merupakan otoritas pimpinan daerah, perhatian terhadap perkembangan pasar serta pedagang tradisional mulai terabaikan sehingga banyak pasar tradisional berubah fungsi menjadi mall dan akhirnya pedagang lama tersingkir.

Pasar memang bukan suatu tempat yang aneh dan asing bagi masyarakat kita. Tapi, persoalan yang ada di pasar sesungguhnya ibarat benang kusut yang

sukar untuk di urai, mengapa, bagaimana, untuk siapa, dan masih banyak lagi hal yang perlu dipertanyakan. Sayangnya pihak yang terkait dengan urusan pasar tidak berusaha menyelesaikannya, justru mencari keuntungan dalam silang sengkabut masalah pasar, baik keuntungan finansial maupun keuntungan politis.

Pemberdayaan aparatur Negara, diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui pembinaan aparatur yang etis, bermoral, berdisiplin, profesional, produktif dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, sekaligus untuk memantapkan dan memelihara persatuan bangsa dan menjaga integritas nasional secara lestari.

Pemerintah Daerah sebagai organisasi publik senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan, sehingga organisasi perlu menyesuaikan diri dengan perubahan itu agar lebih efektif, efisien, adaptif dan responsibility dalam mencapai tujuan. Organisasi mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan, bukan saja karena lingkungan dimana organisasi itu berada mengalami perubahan tapi juga tujuan organisasi, ini merupakan suatu keharusan agar organisasi menyelesaikan permasalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam usaha memberikan fasilitas yang memadai dan lengkap sebagaimana yang diharapkan oleh pedagang dan terus disuarakan oleh para pedagang, hendaknya mendapat tanggapan yang maksimal dari pemerintah daerah. Namun kenyataannya sekarang ini pemerintah daerah belum merealisasikan aspirasi yang disampaikan tersebut.

Dalam susunan pemerintah daerah otonomi seperti kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, maka Eksistensi lembaga pemerintah merupakan salah satu sendi utama untuk mendukung jalannya pemerintahan yang demokratis dengan mengedepankan aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah, karena pemerintah berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 juga menjelaskan tentang ketertiban umum bahwa masyarakat dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau tidak, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. Kebijakan-kebijakan Dinas Pasar meliputi:

1. Dinas Pasar Pekanbaru segera menggulirkan program swastanisasi pengelolaan pasar.
2. Pasar Swasta adalah Pasar yang didirikan/disediakan dan dikelola oleh swasta diatas tanah sendiri yang telah mendapat izin dan dibawah pengawasan, pembinaan Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Mengambil alih pengelolaan sampah pasar swasta oleh Dinas Pasar
4. Masyarakat dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau tidak, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Jika dipertanyakan mengapa harus ada CV. Rio Sejahtera Mandiri Pasar Baru Arengka/Pihak swasta dalam pengelolaan pasar banyak sekali jawaban yang bisa diungkapkan. Contohnya, Pemko mengatakan bahwa pasar yang dikelola langsung oleh dinas pasar dianggap kurang mampu dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tugas-tugas CV. Rio Sejahtera Mandiri Pasar Baru Arengka/pihak swasta terhadap pasar adalah:

1. Mengelola pasar dengan baik
2. Memantau perkembangan pasar
3. Mengatur tata ruang pasar agar rapi, dan lain-lain.

Keberadaan pasar pagi arengka yang terletak di jantung keramaian kota Pekanbaru sangat potensial sekali sebagai tempat memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai pada umumnya dan masyarakat Pekanbaru pada khususnya, hal ini ditandai dengan sangat ramainya masyarakat yang datang untuk mencari kebutuhan yang diperlukan sehari-hari. Didalam lokasi pasar pagi arengka terdapat berbagai macam kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat seperti pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang ayam dan pedagang rempah-rempah.

Berdasarkan pemantauan dan data yang didapat dari pihak yang terkait, tempat-tempat yang telah disediakan oleh pihak pasar adalah :

Tabel I.1 Jumlah Kios-Kios Pada Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru

No	Nama-Nama Kios	Jumlah
1	Kios-Kios	100
2	Meja Sayur	300
3	Meja Ikan	50
4	Meja Daging	10
5	Meja Ayam	10
Total		470

Sumber: CV. Rio Sejahtera Mandiri Pasar Baru Arengka 2012

Begitu banyaknya pedagang yang menempati pasar pagi arengka, maka sudah semestinya pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas yang lengkap dan memadai karena para pedagang telah memenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi daerah, retribusi tersebut dipungut langsung oleh petugas honorer dari Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan (DPKP). Sedangkan jumlah pedagang jika dilihat dari jenis dagangannya dapat dilihat pada tabel I.2 berikut ini : .

Tabel I.2 : Jumlah Responden Kelompok Pedagang

No	Jenis barang yang dijual	Jumlah
1.	Pedagang Sayur	50
2.	Pedagang Daging	8
3.	Pedagang Ikan	48
4.	Pedagang Ayam	8
5.	Pedagang Rempah-rempah	36
Jumlah		150

Sumber : CV. Sejahtera Mandiri Pasar Baru Arengka 2012.

Perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki pelaksanaan peran dan fungsi pemerintah secara optimal terutama dalam menindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang ada di pasar pagi arengka Pekanbaru. Permasalahan-permasalahannya meliputi :

1. Penataan pasar yang tidak beraturan

Penataan pasar yang tidak beraturan disini adalah, para pedagang seenaknya menggelar dagangannya dan pembeli seenaknya parkir di sembarang tempat.

2. Pelebaran tempat berjualan

Jika dilihat, pasar pagi arengka bisa dikatakan cukup ramai pedagang dan pembeli, sehingga dimungkinkan untuk pelebaran tempat berjualan agar para pedagang tidak lagi berjualan ditrotoar, jalur hijau serta badan jalan.

3. Kebersihan pasar

Pasar Pagi Arengka merupakan pasar dimana kebersihannya selalu dipermasalahan. Fakta dilapangan pasar tersebut kumuh, semrawut, becek, bau dan sumpek.

Aspirasi masyarakat dalam kasus Pasar Pagi Arengka, yakni pengaduan dari masyarakat untuk penataan pasar pagi arengka yang tidak beraturan karena lokasi pasar sempit sementara pedagang banyak. Pengaduan terus berlanjut menjadi tuntutan pedagang agar disediakan fasilitas yang lengkap dan memadai serta penataan atas pedagang guna menampung seluruh pedagang yang ada, supaya memudahkan masyarakat untuk berbelanja, karena pedagang telah membayar retribusi.

Pada hakekatnya pemerintah daerah untuk merealisasikan aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang, pemerintah daerah harus melakukan pengembangan serta penataan dengan kondisi pasar pagi arengka yang tidak

beraturan pada saat ini. Substansi dari pengembangan dan penataan adalah sebagai berikut :

1. Untuk keteraturan
2. Keindahan pasar
3. Memudahkan para masyarakat untuk melakukan transaksi berbelanja
4. Meningkatkan aktifitas ekonomi

Keadaan pasar yang ada sekarang ini khususnya pasar pagi arengka pekanbaru belum ditata dengan baik dan teratur, dimana banyaknya para pedagang yang masih menggelar dagangannya ditempat yang tidak seharusnya dan sangat mengganggu para pembeli untuk menuju pasar tersebut dan tidak teraturnya jenis barang yang dijual di pasar pagi arengka.

Kondisi yang berlaku demikian, dapat diduga bahwa aspirasi masyarakat pedagang dalam kasus pasar pagi arengka di Pekanbaru Kecamatan Marpoyan Damai belum ditindak lanjuti secara optimal, hal ini terindikasi dari gejala yang ditemui melalui penelitian yang telah dilakukan, yaitu semakin banyaknya aspirasi pedagang kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah pasar pagi arengka dan aspirasi masyarakat pedagang arengka belum mendapat respon positif dari pemerintah daerah sebagaimana yang diharapkan.

Bertitik tolak dari gejala yang ditemui, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul “ **Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional (Study Kasus pada Pasar Pagi Arengka Pekanbaru).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan gejala yang telah dipaparkan diatas, dapatlah dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru sudah efektif ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru sudah berjalan efektif atau belum.
2. Untuk mengetahui satu kebijakan yang harus diambil Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.

b. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memperkaya dan mempertajam khasanah bagi perkembangan kepustakaan ilmu social terutama ilmu Administrasi Negara khususnya studi kebijakan.

2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah khususnya pemerintah daerah kecamatan marpoyan damai dalam menentukan arah kebijakan publik.
3. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang meneliti dalam bidang yang sama.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Di dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Pada bab ini membahas tentang beberapa teori yang melandasi penulisan yaitu Pengertian Kebijakan, Aktor-Aktor yang Berperan Dalam Proses Kebijakan, Aktor-Aktor Yang Terlibat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan, Pengertian Pemerintah, Fungsi Pemerintah, Hipotesis, Variabel Penelitian, dan Konsep Operasional.

Bab III : Metodologi Penelitian

Didalam bab ini membahas tentang Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sample, Metode Pengumpulan Data, dan diakhiri dengan Teknik Analisa Data.

Bab IV : Gambaran Umum Penelitian

Didalam bab ini membahas tentang Gambaran Umum Kecamatan Marpoyan Damai, keadaan geografis Kecamatan Marpoyan Damai, Pemerintahan Pekanbaru, jumlah pedagang di Pasar pagi arengka, sekilas sejarah berdirinya pasar pagi arengka, lokasi dan jumlah tempat yang tersedia di Pasar pagi arengka.

Bab V : Hasil dan Analisa Data

Didalam bab ini membahas tentang identitas Responden, Keadaan Pasar Pagi Arengka, Respon Pedagang Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Pagi Arengka, Faktor-faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pedagang di Pasar Pagi Arengka, Hasil Penelitian, dan Terakhir Pengujian Hipotesis.

Bab VI : Kesimpulan Dan Saran

Merupakan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang penulis temukan dan kemudian diberikan saran-saran kepada hasil temuan tersebut.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (**Winarno, 2007 : 18**).

Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*) (**Nugroho, 2009 : 86**).

Carl Friederich (1969) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (**Leo Agustino, 2006 : 7**).

Defenisi kebijakan menurut **Thomas R. Dye yang dikutip Riant Nugroho D (2004:3)** adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Carl Freidrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan, kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan

mengatasi dalam rangka merealisasikan suatu tujuan yang akan dicapai (**dalam Winarno, 2004 : 16**).

Adapun pendapat David Easton tentang kebijakan adalah sebagai pengaruh (input) dari aktivitas pemerintah (**dalam Nugroho, 2004:4**). Dalam analisa sistemnya, kemudian Easton menambahkan “suatu konseptualisasi yang telah disiapkan (ready-made) guna membantu mengidentifikasi dan meneliti permasalahan utama yang akan dihadapi dalam studi keluaran kebijakan (**dalam Varma, 2005:291**).

Dengan demikian, kebijakan yang diusulkan atau out put yang dihasilkan harus mengandung konsekuensi-konsekuensi moral. Konsekuensi moral tersebut ialah melalui pertimbangan-pertimbangan secara normatif dalam interaksi antara penguasa, penyelenggara dengan masyarakat, serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan (**Nugroho, 2003 : 110**).

Kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan publik, yaitu yang dibuat oleh legeslatif, eksekutif dan legeslatif bersama eksekutif (dan sebaliknya) (**Riant Nugroho, 2009 : 135**). Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tertinggi di Indonesia dibuat oleh legeslatif, yaitu konstitusi (UU 45) dan ketetapan MPR RI; seperti prinsip dasar teori politik *Tias Politika* yang diajarkan Montesquieu pada abad pencerahan di perancis abad ke- 17.

Kebijakan tidak hanya di pahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok atau individu (**Budi Winarno, 2007 : 19**).

Disini Theodore J. Lewi membagi amatan kebijakan public menjadi dua, yakni yang berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan prosedur (**Winarno, 2003 : 6**).

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (dikutip Dye 1981) berpendapat bahwa kebijakan public hendaklah berisi tujuan , nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (**AG. Subarsono, 2005 : 3**).

Ada enam langkah perumusan kebijakan negara yaitu, perumusan masalah kebijaksanaan negara, proses memasukkan agenda masalah kedalam agenda pemerintahan, perumusan usulan kebijaksanaan negara, proses legitimasi kebijaksanaan negara dan penilaian kebijaksanaan (**Irfan Islamy, 2004 : 15**).

Sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang tidak di sengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi atau praktik administrasi. Makna kata kebijakan juga harus dipahami dalam konteks historis. Pasalnya, sebagaimana konsep publik, maka kebijakan yang senantiasa berubah ini menunjukan kepada kita perubahan-perubahannya dalam praktik kebijakan (**Wayne Parsons, 2006 : 14**).

Kebijakan memiliki beberapa implikasi, yaitu :

- a. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan;
- b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri;
- c. Kebijakan ialah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur roda pemerintahan;
- d. Kebijakan mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif (**Budi Winarno, 2007 : 20**).

Ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan
 - b. Implementasi kebijakan
 - c. Evaluasi kebijakan
 - d. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan
- (Nugroho, 2009 : 145).

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas menciptakan tentang proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab-akibat dan kinerja kebijakan dalam program publik (Harold dan William 2003 : 1).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2009:494).

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam *policy statement*. Pada tahap ini pengarahan sumberdaya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, implementasi kebijakan terwujud dari kegiatan-kegiatan yang konkrit (Wahab, 2002 : 64).

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur

rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu, tidak salah jika dikatakan implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan (Wahab, 2004 : 59).

Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi (Lijan, 2008 : 37).

Petter de Leon dan Linda de Leon (2004 : 37) mengungkapkan bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik di kelompokkan menjadi tiga generasi yaitu:

- a. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya.
- b. Generasi kedua, yaitu pada tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (*top-downer perspective*). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik.
- c. Generasi ketiga, yaitu pada tahun 1990-an. Memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksanaan implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Nugroho, 2009 : 501).

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

Adapun yang menjadi hal penentu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur yaitu (AG Subarsono, 2005: 90 - 92) :

- a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi

tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (Target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut (Sugiyono. 2005 : 49).

Oleh sebab itu komunikasi itu harus mempunyai unsur :

- 1) Ketetapan komunikasi dengan pelaksana.
- 2) Konstan/keseragaman.
- 3) Ukuran-ukuran dari tujuan itu harus dinyatakan dengan jelas.
- 4) Mekanisme dari prosedur lembaga terlibat.
- 5) Bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka kerjakan.
- 6) Komunikasi membutuhkan keakuratan.
- 7) Implementasi ini tidak hanya diterima, namun mereka harus juga jalan, jika tidak para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.
- 8) Komunikasi ukuran implementasi adalah konsistensinya.
- 9) Penolakan melalui kebijakan biasa mengarah baik pada rintangan total atau distorsi komunikasi (Hassel Nogi, 2003 : 45).

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif (Hassel Nogi S, 2003). Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana, didalam hal tersebut harus memberikan pelayanan.

Sumber daya adalah merupakan salah satu faktor penting agar implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.

c. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi kebijakan (**Hassel Nogi, 2003:9**).

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standar Operating/SOP*), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor didalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dari sumber-sumber dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam kerjanya organisasi-

organisasi yang kompleks dan tersebar luas, ini tetap berlaku karena ketidak aktifan birokrasi.

Proses kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktifitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (AG Subarsono, 2005 : 8).

3. Aktor-aktor Yang Berperan Dalam Proses Kebijakan

Dalam proses kebijakan, menurut Charles Jones (**dalam Solichin, 2005 : 29**) sedikitnya ada 4 (empat) golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni: golongan rasional, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis. Uraian berikut akan menguraikan bagaimana pelaku masing-masing golongan atau aktor tersebut dalam proses kebijakan.

a. Golongan rasional

Dengan metode rasional ini diasumsikan bahwa segala tujuan dapat ditetapkan sebelumnya dan bahwa informasi atau data yang serba lengkap dapat disediakan. Oleh sebab itu gaya kerja golongan rasional cenderung seperti gaya kerja seorang rasional komprehensif, yakni seorang yang berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap alternatif yang mungkin, berikut semua akibat dan dukungannya terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

b. Golongan teknisi

Golongan teknisi dalam melaksanakan tugasnya boleh jadi memiliki kebebasan, namun ini sebatas pada lingkup pekerjaan dan keahliannya, peran yang mereka mainkan dalam hal ini sebagai seorang spesialis atau ahli yang membutuhkan tenaganya untuk menangani tugas-tugas tertentu.

c. Golongan inkrementalis

Golongan aktor inkrementalis identik dengan para politisi, cenderung memiliki sifat kritis namun acapkali tidak sabaran terhadap gaya kerja para perencana dan teknisi, walaupun mereka sebenarnya amat tergantung pada apa yang dikerjakan oleh para perencana dan para teknisi.

d. Golongan reformis

Golongan actor reformis pada dasarnya juga mengakui akan terbatasnya informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses kebijakan. Nilai-nilai yang mereka junjung tinggi ialah yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan perubahan sosial. Gaya golongan aktor reformis ini umumnya sangat radikal, kerap kali disertai dengan tindakan-tindakan demokrasi dan konfrontasi dengan pihak pemerintah. (Solichin, 2005:35).

4. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan

Pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah :

a. Pemerintah

Pemerintah merupakan abdi masyarakat, maka hendaknya pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan harus memperhatikan kepentingan orang banyak (masyarakat atau rakyat). Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL).

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD memiliki peranan yang penting sebagai perwakilan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya. DPRD haruslah tetap menjadi cerminan masyarakat yang diwakilinya dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak (rakyat), sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut DPRD harus melakukan komunikasi dengan masyarakat guna mencari masukan dalam proses perumusan. Hal ini dimungkinkan dalam rangka mencari serta menggali apa yang menjadi keinginan masyarakat.

c. Tokoh Masyarakat

Peran serta tokoh masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan sangat diharapkan peran aktifnya secara tidak langsung karena tokoh masyarakat salah satu tempat masyarakat untuk

menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, tokoh masyarakat merupakan orang yang sangat disegani dan dihormati oleh pemerintah. Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah pimpinan atau orang yang dituakan di lingkungan Pasar Pagi Arengka.

d. Media Massa

Media dapat ikut berperan dalam proses pengambilan suatu kebijakan, karena media mengupas atau mengangkat isu-isu yang lagi hangat dibicarakan oleh masyarakat dan pemerintahan.

e. Kelompok Kepentingan

Didalam membuat suatu kebijakan pemerintah terkadang harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tersembunyi, dimana kekuatan-kekuatan tersebut memanfaatkan keadaan yang tidak tertata dengan baik. Kelompok kepentingan tersebut dengan kata lain adalah kekuatan-kekuatan tersembunyi seperti organisasi masyarakat, preman, dan organisasi informal.

5. Proses pembuatan kebijakan

Dalam proses pembuatan kebijakan yang merupakan serangkaian tahap demi tahap yang meliputi:

a. Penyusunan agenda kebijakan

Pada tahap ini terdapat perumusan masalah guna mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap definisi masalah proses pembuatan kebijakan. Perumusan tersebut membantu

menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Formulasi kebijakan

Tahap ini memerlukan pemahaman yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi dimasa mendatang sebagai tindakan alternatif. Peramalan menguji masa depan yang potensial, secara normative bernilai, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan (Sujianto, 2008 : 38).

c. Adopsi kebijakan

Dalam tahap ini melakukan rekomendasi terhadap alternatif yang akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan yang relevan dengan prinsip-prinsip kebijakan. Rekomendasi membantu etimasi tingkat rasional dan ketidakpastian, mengenali eksternalisasi dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan keputusan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

d. Implementasi kebijakan

Pada tahap ini pengambilan kebijakan berusaha melakukan pemantauan (monotoring) tentang akibat dari kebijakan yang diambil

sebelumnya atas dasar pengetahuan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak-letak pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

e. Evaluasi kebijakan

Dibagian evaluasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Tujuan ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan, menyumbangkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian masalah (Tangkilisan, 2003 : 49).

B. Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sivil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntunan (harapan) yang diperintah. (Taliziduhu Ndraha, 2003:6)

Istilah pemerintah, berasal dari kata “perintah” berarti perkataan, menurut kamus bahasa Indonesia “perintah” berarti perkataan yang bermaksud menyuruh

melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberikan perintah. (**Taliziduhu Ndraha, 2003:74**).

Istilah pemerintah didalam **UD 1945** pertama-tama tercantum didalam alenia keempat pembukaan undang-undang yang berbunyi :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa,
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- c. Persatuan Indonesia, dan
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
- e. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan pernyataan tersebut diatas maka tertariklah sebuah garis sedemikian rupa sehingga “timbul” dua pihak : pemerintah dan yang diperintah. Pemerintah dalam hal ini segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. UU No. 32 tahun 2005 pasal 19 ayat 2, yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kepala daerah diharapkan dapat bekerja sama dengan DPRD agar tertib pemerintahan di daerah dapat berjalan, dengan demikian DPRD adalah unsur pemerintah daerah, kepala daerah memimpin dalam bidang eksekutif dan DPRD bergerak dalam bidang legislatif.

Ketika pemerintah Negara Indonesia berdiri, lembaga (organisasi) banyaklah yang terbentuk, sehingga timbul anggapan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh lembaga yang disebut pemerintah itulah pemerintahan yang legal dan legitimasi dan adapun hasilnya itulah produk pemerintah. Defenisi pemerintah harus dilakukan melalui pendekatan fungsional atau produk. (Taliziduhu Ndraha, 2003:73)

2. Fungsi-fungsi Pemerintah

Ada tiga macam fungsi hakiki pemerintah yaitu:

a. Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia, untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat.

b. Pelayanan

Di bidang pemerintahan tidaklah kalah pentingnya masalah pelayanan itu, bahkan perannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparatur pegawai negeri makin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkatkan kedudukannya dimata masyarakat menjadi suatu hak, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Pelayanan terdiri dari 4 (empat) unsur pokok yaitu:

- 1) Biayanya harus relatif lebih murah.
- 2) Waktu untuk mengerjakan relatif cepat.
- 3) Mutu yang diberikan relatif lebih bagus.
- 4) Ramah, sopan dan professional.

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya.

Pemberdayaan harus terus-menerus, komprehensif dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang di perintah. Dalam hubungan itu diperlukan berbagai program pemberdayaan :

1) Pemberdayaan politik.

Pemerintah bertujuan meningkatkan *bargaining position* masyarakat terhadap pemerintah, melalui *bargaining position* tersebut, masyarakat mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian, tanpa merugikan orang lain.

2) Pemberdayaan politik ekonomi.

Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko

salah-urus, pemikul beban pembangunan, kambing hitam kegagalan program, dan penderita kerusakan lingkungan.

3) Pemberdayaan politik social budaya.

Bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investmen*, guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.

4) Pemberdayaan politik lingkungan

Dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara manusia dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

Dalam **UU No. 32 tahun 2004** tentang otonomi daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kecamatan/ kota merupakan urusan yang berskala kecamatan/kota terdapat dalam pasal 14 meliputi:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 5) Penanganan bidang kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan kesehatan;
- 7) Penanggulangan masalah sosial;
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- 9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 10) Pengendalian lingkupan hidup;
- 11) Pelayanan pertanahan;
- 12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- 13) Pelayanan administrasi pemerintahan;
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

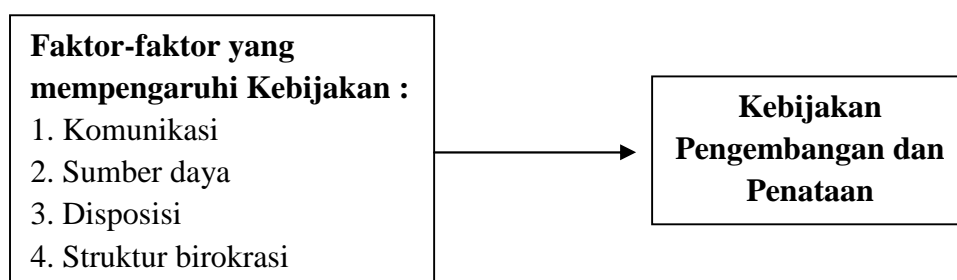
C. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok.

D. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat di buat sebuah kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka berpikir.



Sumber : AG Subarsono, (2005: 90 – 92)

Berdasarkan gambar II.1 di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan pengembangan dan penataan sangat dipengaruhi oleh hubungan komunikasi, sumber daya yang dimiliki, disposisi yang terjadi dan struktur birokrasi yang terjadi harus saling terbina dengan baik.

E. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, perumusan masalah yang diuraikan diatas dan dihubungkan dengan telaah pustaka maka penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru belum efektif.
2. Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru adalah dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

F. Definisi Konsep

Untuk mempermudah serta memperjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengoperasionalkan beberapa konsep yaitu:

1. Kebijakan, adalah suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang tidak dilakukan pemerintah atau yang diusulkan seseorang, sekelompok orang yang memiliki perbedaan dan kesamaan pandangan dalam mempengaruhi keluaran (*out-put*) kebijakan yang diharapkan untuk mencapai tujuan bersama.
2. Pemerintah, adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sivil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntunan (harapan) yang diperintah
3. Pengembangan, adalah proses kegiatan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas yang dimiliki.
4. Penataan, adalah proses kegiatan untuk memperbaiki, merubah atau menata kembali tempat yang telah ada sehingga lebih baik dan teratur.

G. Konsep Operasional Penelitian

Tabel: II.1 Konsep Operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Kebijakan	Adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.	<ol style="list-style-type: none">1. Komunikasi2. Sumber daya3. Disposisi4. Struktur birokrasi

Sumber : Leo Agustino (2006 : 7).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ada maka penelitian ini secara umum mengambil lokasi di Pemerintahan Daerah Kecamatan Marpoyan Damai dan secara khusus penelitian Pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Adapun dasar pertimbangan pemilihan lokasi karena kenyataan yang ada bahwa Pemerintah Daerah belum menjalankan perannya secara optimal dalam menyelesaikan kasus di Pasar Pagi Arengka. Adapun penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Mei 2013.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi yang berdasarkan data-data yang ada. Kemudian diteruskan dengan melakukan interpretasi sebagai alur untuk menjelaskan dan menganalisis pada faktor-faktor tertentu terhadap masalah yang diteliti dan berakhir berusaha memprediksikannya.

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah:

1. Data Primer

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog dan tanya jawab secara lisan dengan pihak yang terkait yang dianggap perlu atau yang mengetahui permasalahan tersebut dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip yang didapatkan dari pihak terkait yang mendukung dan melengkapi data-data yang penulis perlukan

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah unsur Sekretariat Daerah, Camat, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pedagang Sayur, Tokoh Masyarakat yang berjumlah 28 orang dan para Pedagang Sayur, Serikat Pedagang berjumlah 150 orang. Pengambilan sampel dengan menggunakan Metode Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Besar Populasi

e^2 = Tingkat Error 10 % (Persen Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi).

(Counsuelo G. Sevila. Dkk, 1993:161)

$$n = \frac{150}{1 + 150 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{150}{1 + 150 (0,01)}$$

$$n = \frac{150}{1 + 1,50}$$

$$n = \frac{150}{2,50}$$

$$n = 60 \text{ Orang}$$

dengan demikian diketahui bahwa jumlah sampel dari para pedagang pasar sebanyak 60 orang, sedangkan untuk pengambilan jumlah sampel pada bagian aparat pemerintahan dan dinas pasar diambil dengan menggunakan metode *Cluster Sampling* (di kelompokkan berdasarkan jenis tertentu) sebagai berikut:

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1	Pedagang Pasar Baru Arengka	150	60	40,0%
2	Pegawai	28	14	50,0%
JUMLAH		178	74	90,0%

Sumber: Data Lapangan, 2012

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan tentu kita harus mencari data, informasi, dan keterangan-keterangan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden.

2. Kuesioner atau Angket

Kuesioner yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian kepada responden

3. Observasi,

Yaitu mengadakan peninjauan langsung lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode Kualitatif yang merupakan analisis Deskriptif dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan dan ditabulasi menurut jenis data dan serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian (**Haryanto, 2003: 20**).

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Dinas Pasar

Dinas Pasar merupakan Instansi yang secara umum berperan dalam memberikan pendapatan kepada Pemerintahan Daerah untuk dapat menggali potensi daerah secara maksimal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

B. Visi dan Misi

Dinas Pasar mempunyai Visi dan Misi, yaitu:

Visi : Terwujudnya Pasar sebagai Pusat Perbelanjaan dan Pelayanan Menuju Masyarakat yang Berbudaya.

Misi : 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perbelanjaan yang bersih, tertib, dan aman

2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif

3. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan

4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menciptakan output dan input yang seimbang

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Dinas Pasar merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pasar memiliki tugas pokok

membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam melaksanakan manajemen Pasar Tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 601 Dinas Pasar Kota Pekanbaru mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengaturan, pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan pasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengadakan penelitian dan menilai tata cara pemungutan retribusi pasar dan sebagainya, sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenang daerah, maupun tugas pembantuan guna menciptakan dan atau mencari cara-cara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
3. Mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pengelolaan pasar dalam Kota Pekanbaru berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang telah digariskan oleh pemerintah daerah maupun instansi yang tinggi;
4. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok;
5. Mengumpulkan , mengelompokkan dan mengolah data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok;
6. Membuat rancangan dan program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok;

7. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan tentang per-pasar-an yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
8. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan pasar di daerah;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pasar dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 601 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pasar;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
4. Pembinaan dan pelaporan;
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

D. Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Susunan Organisasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sub Bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan
4. Sub Bagian Keuangan
5. Sub Bagian Penyusunan Program

6. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
7. Seksi Perencanaan dan Penelitian
8. Seksi Pengembangan Pasar
9. Seksi pembinaan pedagang kaki lima
10. Bidang ketertiban dan kebersihan
11. Seksi ketertiban
12. Seksi kebersihan
13. Seksi pengawasan
14. Bidang Retribusi Pasar
15. Seksi Administrasi Penerimaan
16. Seksi Perhitungan dan Pendapatan Daerah
17. Seksi Administrasi Pembukuan dan Pengendalian
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
19. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar IV.1
Bagan Susunan Organisasi Bidang Ketertiban dan Kebersihan Pasar
Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Pasar Kota Pekanbaru

E. Uraian Tugas Bagian Pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru

1. Sekretaris

Adapun tugas dari sekretaris adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
3. Menkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas;

4. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
6. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas;
9. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
10. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
11. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
13. Memfasilitasi dan asisten tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 604 menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dinas;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga;
3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas;
4. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan;
5. Pengkoordinasian laporan tahunan;
6. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

2. Sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan

Adapun tugas dari Sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan mempunyai rincian tugas :

1. **Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan** dan pembinaan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
3. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi perturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum/tata usaha dan perlengkapan;

4. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi sert pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian , umum, dan perlengkapan;
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
6. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
7. Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas;
9. Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas;
10. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja di lingkungan dinas;
11. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;
12. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas;
13. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat,

enaikan gaji berkal, Buku Induk Pegawai, menyusun DUK dan PNS di lingkungan dinas;

14. Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan DP3 PNS;
15. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub bagian kepegawaian, umum, dan perlengkapan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 607 menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
3. Pengevaluasian tugas administrasi sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

3. Sub Bagian Keuangan

Adapun tugas dari sub bagian keuangan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan;

2. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
4. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melakukan verifikasi laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
7. Melakukan akuntansi dinas;
8. Menyiapkan laporan keuangan dinas;
9. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas;
10. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga dinas;
11. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
12. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
13. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan asil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
14. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;

15. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
16. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program kerja sub bagian keuangan dinas;
2. Pelaksanaan verifikasi;
3. Penyiapan surat perintah membayar;
4. Pelaksanaan akuntansi dinas;
5. Pembagian tugas kepada bawahan;
6. Memberi petunjuk kepada bawahan;
7. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
8. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
9. Pengevaluasian tugas;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

4. Sub Bagian Penyusunan Program

Adapun tugas dari sub bagian penyusunan program mempunyai rincian tugas :

1. **Mengkoordinasikan** usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang dinas;
2. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
3. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan;
5. Merumuskan, melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
6. Merumuskan Renstra, Renja dan program pembangunan tiap tahunnya di lingkungan dinas;
7. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;
8. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
9. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
10. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
11. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
12. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

13. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian penyusunan program dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud harus menyelenggarakan fungsinya :

1. Penyusunan program kerja;
2. Pengumpulan data dan informasi;
3. Pengendalian dan pelaporan;
4. Pengumpulan petunjuk teknis;
5. Perumusan rencana kerja;
6. Penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

5. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

Adapun tugas bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar mempunyai rincian tugas :

1. Mengkoordinasikan dalam membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar didalam Satuan Kerja Dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan;
2. Merumuskan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian, serta pengembangan pasar;

3. Mengkoordinasi serta membina, merumuskan, mengumpulkan, mensistemasikan, serta menganalisa setiap data pasar yang ada;
4. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;
5. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan pelaksanaan, penelitian dan menganalisa rencana-rencana pengembangan pasar;
6. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan Satuan Kerja Tugas Dinas Pasar;
7. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugasnya;
8. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan serta memberikan tugas teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
9. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
10. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan pelaksanaan tugas sub bidang masing-masing;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud harus dapat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian dalam membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam Satuan Kerja Dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan;
2. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar;
3. Pengkoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada;
4. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;
5. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar;
6. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan Satuan Kerja Dinas Pasar;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

6. Seksi Perencanaan dan Penelitian

Seksi perencanaan dan penelitian mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja di tempat kerja, mudah diambil atau mudah digunakan;

2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merencanakan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan hari-hari yang akan datang;
3. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala sub bidang dinas dalam menyusun kebijaksanaan, program, dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
5. Merumuskan dan melaksanakan penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pembangunan pasar;
6. Merumuskan dan melaksanakan serta membuat rencana kerja/kegiatan dinas pasar secara umum untuk setiap tahun anggaran;
7. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya;
8. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
9. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;

10. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja di tempat kerja, mudah diambil atau mudah digunakan;
11. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
12. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
13. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala sub dinas dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
14. Merumuskan dan melaksanakan penelitian dibidang retribusi pengelolaan pasar khususnya yang menyangkut teknis administrasi;
15. Merumuskan dan melaksanakan penelitian serta penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar;
16. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan tugas di bidang tugasnya;
17. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya;

18. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;

19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 616 menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
2. Penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan pembangunan pasar;
3. Penelitian retribusi pengelolaan pasar, penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar;
4. Penyusunan program kerja;
5. Pelaksanaan pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
7. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
8. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
9. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

7. Seksi Pengembangan Pasar

Seksi pengembangan pasar mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja dan ditempat kerja, mudah diambil atau digunakan;
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
3. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala sub dinas dalam penyusunan kebijaksanaan, program prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
5. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan pasar dibidang retribusi pengelolaan pasar khususnya yang menyangkut teknis administrasi;
6. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan pasar serta penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar;
7. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat memantapkan kegiatan tugas dibidang tugasnya;
8. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya;

9. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pengembangan pasar dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud harus dapat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
2. Pengembangan pasar dibidang retribusi pengelolaan pasar, penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar;
3. Penyusunan program kerja;
4. Pelaksanaan pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
6. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
7. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
8. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

8. Seksi Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Adapun tugas seksi pembinaan pedagang kaki lima mempunyai rincian tugas :

1. **Penyediaan** tempat usaha pedagang kaki lima;

2. Pembinaan pedagang kaki lima dan evaluasi output penataan keberhasilan pembinaan pedagang;
3. Penempatan pedagang kaki lima dan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi;
4. Perumusan dan pelaksanaan serta penempatan pedagang kaki lima kearah yang dapat memantapkan seluruh kegiatan;
5. Pengendalian, pengawasan dalam pembinaan pedagang kaki lima;
6. Penyusunan program kerja;
7. Pelaksanaan pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
9. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
10. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
11. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

9. Bidang Ketertiban dan Kebersihan

Bidang ketertiban dan kebersihan dalam melaksanakan rincian tugas harus dapat menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja;
2. Pengkoordinasian, pembimbingan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan;
3. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

10. Seksi Ketertiban

Seksi ketertiban dalam melaksanakan rincian tugas harus dapat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja;
2. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
3. Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban pasar;
4. Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengaur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar;
5. Perumusan dan pelaksanaan koordinasi dengan pihak keamanan yang lain sehubungan dengan pelaksanaan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan pasar;
6. Pelaksanaan tugs-tugas lain.

11. Seksi Kebersihan

Seksi kebersihan dalam melaksanakan rincian tugas harus dapat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
2. Pengawasan, pemeliharaan kebersihan dan penghijauan pertamanan di lingkungan pasar;

3. Pelaksanaan rencana penggunaan serta pengaturan petugas pelaksana kebersihan dan peralatan kebersihan didalam lingkungan pasar;
4. Penyusunan program kerja;
5. Pelaksanaan pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
7. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
8. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
9. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

12. Seksi Pengawasan

Seksi pengawasan dalam melaksanakan rincian tugas harus dapat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
2. Melaksanakan program/laporan pengawasan atas usaha-usaha penerimaan, penagihan retribusi pengelolaan pasar;
3. Pelaksanaan pengumpulan data dibidang retribusi pengelolaan pasar;
4. Pengawasan terhadap penerimaan pemasukan retribusi pengelolaan pasar;
5. Pelaksanaan perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
6. Penyusunan program kerja;
7. Pelaksanaan pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;

9. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
10. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
11. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

13. Bidang Retribusi Pasar

Bidang retribusi pasar dalam melaksanakan rincian tugas harus dapat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait;
2. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar;
3. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan kepala bagian tata usaha;
5. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan buku registrasi data pedagang dan buku registrasi pasar yang ada didalam lingkungan pasar;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

14. Seksi Administrasi Penerimaan

Seksi administrasi penerimaan dalam melaksanakan rincian tugas harus dapat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
2. Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar;
3. Pemeliharaan dokumen penagihan secara teratur kepada wajib retribusi;
4. Penyelesaian tunggakan-tunggakan dari wajib retribusi berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait;
5. Penyusunan program kerja;
6. Pelaksanaan pelayanan umum;
7. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
8. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
9. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
10. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

15. Seksi Perhitungan dan Pendapatan Daerah

Seksi perhitungan dan pendapatan daerah dalam melaksanakan rincian tugas harus dapat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan dan peralatan kerja;
2. Pengelolaan data penerimaan retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi dengan sub bagian dan lain yang terkait;

3. Penyusunan rencana penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
4. Penyusunan perhitungan penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
5. Penyusunan program kerja;
6. Pelaksanaan pelayanan umum;
7. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
8. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
9. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
10. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

16. Seksi Administrasi Pembukuan dan Pengendalian

Seksi administrasi pembukuan dan pengendalian dalam melaksanakan rincian tugas harus dapat menyelenggarakan fungsi :

1. **Penyiapan bahan** dan peralatan kerja;
2. Penyimpanan serta memelihara arsip yang berhubungan dengan retribusi pengelolaan pasar;
3. Perumusan dan pelaksanaan penyelenggaraan buku registrasi data pedagang dan buku registrasi pengelolaan pasar yang ada di lingkungan pasar berkoordinasi dengan sub bagian dan seksi lainnya yang terkait;
4. Pelaksanaan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
5. Penyusunan program kerja;
6. Pelaksanaan pelayanan umum;

7. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
8. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
9. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
10. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden dalam penelitian ini, identitas responden dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.

1. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel V.1 berikut ini :

Tabel V.1 : Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Perempuan	49	66,2
2	Laki-laki	25	33,8
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Berdasarkan Tabel V.1 di atas dapat diketahui bahwa responden perempuan sebanyak 49 orang atau (66,2 %) sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang atau (33,8 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini tentu sesuai dengan profesinya sebagai seorang pedagang pasar.

2. Identitas Responden Menurut Tingkat Usia

Untuk mengetahui tingkat usia responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini :

Tabel V.2 : Identitas Responden Menurut Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	15-25	7	9,5
2	26-35	23	31,1
3	36-45	34	45,9
4	di atas 46	10	13,5
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Bedasarkan Tabel V.2 di atas dapat diketahui identitas responden menurut tingkat usia sebanyak 7 orang atau (9,5 %) responden berusia diantara 15-25 tahun, sebanyak 23 orang atau (31,1 %) responden berusia diantara 26-35 tahun, kemudian sebanyak 34 orang atau (45,9 %) responden berusia diantara 36-45 tahun dan sebanyak 10 orang atau (13,5 %) responden berusia di atas 46 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden berusia diantara 36 – 45 tahun.

3. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui Tingkat Pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini :

Tabel V.3 : Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	13	17,6
2	SLTP	19	25,7
3	SLTA	25	33,8
4	S1	17	23,0
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Berdasarkan Tabel V.3 di atas dapat diketahui identitas responden menurut tingkat pendidikan, sebanyak 13 orang atau (17,6 %) responden berpendidikan SD, sebanyak 19 orang atau (25,7 %) berpendidikan SLTP sedangkan 25 orang atau (33,8 %) berpendidikan SLTA sederajat dan sebanyak 17 orang atau (23,0%) responden berpendidikan S1. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden berpendidikan SLTA.

B. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dalam analisa sistemnya, kemudian Easton menambahkan “suatu konseptualisasi yang telah disiapkan (ready-made) guna membantu mengidentifikasi dan meneliti permasalahan utama yang akan dihadapi dalam studi keluaran kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan yang diusulkan atau out put yang dihasilkan harus mengandung konsekuensi-konsekuensi moral. Konsekuensi moral tersebut ialah melalui pertimbangan-pertimbangan secara normatif dalam interaksi antara penguasa, penyelenggara dengan masyarakat, serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan.

Kebijakan tidak hanya di pahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok atau individu. Disini Theodore J. Lewi membagi amatan kebijakan public menjadi dua, yakni yang berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan prosedur. Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (dikutip Dye 1981) berpendapat bahwa kebijakan public hendaklah berisi tujuan , nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat .

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pengembangan yang akan dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel V.4 : Tanggapan Responden apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pengembangan yang akan dilakukan oleh pemerintah

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	36	48,6
2	Tidak setuju	24	32,4
3	Sangat tidak setuju	14	18,9
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.4 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pengembangan yang akan dilakukan oleh pemerintah didapati sebanyak 36 orang respoden atau (48,6 %), yang menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 24 orang responden atau (32,4 %) kemudian yang menyatakan tidak tahu sebanyak 14 orang responden atau (18,9 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang apakah bapak /ibu setuju bahwa pengembangan dan penataan akan mempengaruhi jumlah pembeli makin turut meningkat dapat dilihat pada tabel V.5 berikut ini :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden dengan dilakukan pengembangan dan penataan, maka jumlah pembeli makin turut meningkat.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	16	21,6
2	Tidak setuju	34	45,9
3	Sangat tidak setuju	24	32,4
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.5 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa dengan dilakukan pengembangan dan penataan, maka jumlah pembeli makin turut meningkat diketahui sebanyak 16 orang responden atau (21,6 %), yang menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 34 orang responden atau (45,9 %) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 24 orang responden atau (32,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Apakah dengan dilakukannya pengembangan dan penataan pasar akan memudahkan masyarakat untuk berbelanja dapat dilihat dari tabel V.6 berikut ini :

Tabel V.6 : Tanggapan Responden dengan dilakukannya pengembangan dan penataan pasar akan memudahkan masyarakat untuk berbelanja.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	37	50,0
2	Tidak setuju	21	28,4
3	Sangat tidak setuju	16	21,6
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.6 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa dengan dilakukannya pengembangan dan penataan pasar akan memudahkan masyarakat untuk berbelanja diketahui bahwa sebanyak 37 orang responden atau (50,0 %), yang menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 21 orang responden atau (28,4 %) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 16 orang responden atau (21,6 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang jika dengan dilakukannya pengembangan dan penataan nantinya keindahan dan keteraturan pasar akan terlihat dapat dilihat pada tabel V.7 berikut ini :

Tabel V.7 : Tanggapan Responden jika dengan dilakukannya pengembangan dan penataan nantinya keindahan dan keteraturan pasar akan terlihat.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	52	70,3
2	Tidak setuju	16	21,6
3	Sangat tidak setuju	6	8,1
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.7 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa jika dengan dilakukannya pengembangan dan penataan nantinya keindahan dan keteraturan pasar akan terlihat diketahui bahwa sebanyak 52 orang responden atau (70,3 %), yang menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 16 orang responden atau (21,6 %) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 6 orang responden atau (8,1 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang lamanya menempati pasar pagi arengka sudah lebih dari 1 tahun dapat dilihat dari tabel V.8 berikut ini :

Tabel V.8 : Tanggapan Responden tentang lamanya menempati pasar pagi arengka sudah lebih dari 1 tahun.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	68	91,9
2	Tidak setuju	6	8,1
3	Sangat tidak setuju	0	0,0
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.8 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa lamanya menempati pasar pagi arengka sudah lebih dari 1 tahun diketahui bahwa sebanyak 68 orang responden atau (91,9 %), yang menyatakan setuju, sedangkan dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang responden atau (8,1 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang setuju kah bapak/ibu bahwa masyarakat ramai berbelanja di Pasar Arengka ini dapat dilihat pada tabel V.9 berikut ini :

Tabel V.9 : Tanggapan Responden setuju kah bapak/ibu bahwa bahwa masyarakat ramai berbelanja di Pasar Arengka ini.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	73	98,6
2	Tidak setuju	4	5,4
3	Sangat tidak setuju	0	0,0
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.9 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa setuju kah bapak/ibu bahwa masyarakat ramai berbelanja di Pasar Arengka ini diketahui bahwa sebanyak 73 orang responden atau (98,6 %), yang menyatakan setuju dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 orang responden atau (5,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Apakah bapak/ibu setuju bahwa masyarakat lebih sering membeli pada pedagang kaki lima yang ada di depan Pasar Pagi Arengka ini dapat dilihat dari tabel V.10 berikut ini :

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Apakah bapak/ibu setuju bahwa masyarakat lebih sering membeli pada pedagang kaki lima yang ada di depan Pasar Pagi Arengka ini.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	46	62,2
2	Tidak setuju	25	33,8
3	Sangat tidak setuju	3	4,1
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.10 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa Apakah bapak/ibu setuju bahwa masyarakat lebih sering membeli pada pedagang kaki lima yang ada di depan Pasar Pagi Arengka ini diketahui bahwa sebanyak 46 orang responden atau (62,2 %), yang menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 25 orang responden atau (33,8 %) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 orang responden atau (4,1 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang apakah bapak/ibu setuju bahwa keteraturan pasar akan turut berpengaruh dengan pendapatan penjualan dapat dilihat pada tabel V.11 berikut ini :

Tabel V.11 : Tanggapan Responden apakah bapak/ibu setuju bahwa keteraturan pasar akan turut berpengaruh dengan pendapatan penjualan.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	53	71,6
2	Tidak setuju	21	28,4
3	Sangat tidak setuju	0	0,0
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.11 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa keteraturan pasar akan turut berpengaruh dengan pendapatan penjualan diketahui bahwa sebanyak 53 orang responden atau (71,6 %), yang menyatakan setuju dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 21 orang responden atau (28,4 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang apakah bapak/ibu setuju bahwa kondisi Pasar Pagi Arengka tidak beraturan seperti sekarang ini dapat dilihat dari tabel V.12 berikut ini :

Tabel V.12 : Tanggapan Responden apakah bapak/ibu setuju bahwa kondisi Pasar Pagi Arengka tidak beraturan seperti sekarang ini

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	39	52,7
2	Tidak setuju	21	28,4
3	Sangat tidak setuju	14	18,9
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.12 terlihat jawaban responden yang menyatakan apakah bapak/ibu setuju bahwa kondisi Pasar Pagi Arengka tidak beraturan seperti sekarang ini diketahui bahwa sebanyak 39 orang responden atau (52,7 %), yang menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 21 orang responden atau (28,4 %) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 14 orang responden atau (18,9 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang apakah bapak/ibu setuju bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah selama ini telah mencukupi dapat dilihat pada tabel V.13 berikut ini :

Tabel V.13 : Tanggapan Responden apakah bapak/ibu setuju bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah selama ini telah mencukupi.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	7	9,5
2	Tidak setuju	47	63,5
3	Sangat tidak setuju	20	27,0
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.13 terlihat jawaban responden yang menyatakan apakah bapak/ibu setuju bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah selama ini telah mencukupi diketahui bahwa sebanyak 7 orang responden atau (9,5 %), yang menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 47 orang responden atau (63,5 %) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 20 orang responden atau (27,0 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang apakah bapak/ibu setuju bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan kepada pedagang untuk melakukan pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka dapat dilihat dari tabel V.14 berikut ini :

Tabel V.14 : Tanggapan Responden apakah bapak/ibu setuju bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan kepada pedagang untuk melakukan pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	11	14,9
2	Tidak setuju	47	63,5
3	Sangat tidak setuju	16	21,6
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.14 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa apakah bapak/ibu setuju bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan kepada pedagang untuk melakukan pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka diketahui bahwa sebanyak 11 orang responden atau (14,9 %), yang menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 47 orang responden atau (63,5 %) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 16 orang responden atau (21,6 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang apakah bapak/ibu setuju bahwa pemerintah daerah mempunyai keinginan untuk melakukan pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka dapat dilihat pada tabel V.15 berikut ini :

Tabel V.15 : Tanggapan Responden apakah bapak/ibu setuju bahwa pemerintah daerah mempunyai keinginan untuk melakukan pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	35	47,3
2	Tidak setuju	27	36,5
3	Sangat tidak setuju	12	16,2
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.15 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai keinginan untuk melakukan pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka diketahui bahwa sebanyak 35 orang responden atau (47,3 %), yang menyatakan setuju, sedangkan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 27 orang responden atau (36,5 %) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 12 orang responden atau (16,2 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Apakah bapak/ibu setuju apabila pemerintah meningkatkan harga beli tempat untuk berjualan dapat dilihat dari tabel V.16 berikut ini :

Tabel V.16 : Tanggapan Responden Apakah bapak/ibu setuju apabila pemerintah meningkatkan harga beli tempat untuk berjualan.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	0	0,0
2	Tidak Setuju	17	23,0
3	Sangat tidak setuju	57	77,0
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.16 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa apabila pemerintah meningkatkan harga beli tempat untuk berjualan diketahui bahwa sebanyak 17 orang responden atau (23,0 %) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 57 orang responden atau (77,0 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang apakah bapak/ibu setuju jika pemerintah meminta agar bapak/ibu pindah berjualan dari tempat sekarang ini dapat dilihat pada tabel V.17 berikut ini :

Tabel V.17 : Tanggapan Responden apakah bapak/ibu setuju jika pemerintah meminta agar bapak/ibu pindah berjualan dari tempat sekarang ini.

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	0	0,0
2	Tidak setuju	12	16,2
3	Sangat tidak setuju	62	83,8
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.17 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa jika pemerintah memnta agar apak/ibu untuk pindah berjualan dari tempat sekarang ini diketahui bahwa sebanyak 12 orang respoden atau (16,2 %), yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 62 orang responden atau (83,8 %).

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Apakah bapak/ibu mempunyai rencana untuk pindah berjualan dari tempat sekarang ini dapat dilihat pada tabel V.18 berikut ini :

Tabel V.18 : Tanggapan Responden Apakah bapak/ibu mempunyai rencana untuk pindah berjualan dari tempat sekarang ini

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden	Persentase
		(Orang)	(%)
1	Setuju	2	2,7
2	Tidak setuju	14	18,9
3	Sangat tidak setuju	58	78,4
Jumlah		74	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.18 terlihat jawaban responden yang menyatakan bahwa Apakah bapak/ibu mempunyai rencana untuk pindah berjualan dari tempat

sekarang ini diketahui bahwa sebanyak 2 orang responden atau (2,7 %), yang menyatakan setuju, kemudian yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14 orang responden atau (18,9 %). dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 58 orang responden atau (78,4 %).

Sedangkan untuk melihat rekapitulasi hasil jawaban responden terhadap kebijakan pemerintah tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.19 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional.

No	Pertanyaan	Frekuensi			
		S	TS	STS	Jumlah
1	Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pengembangan yang akan dilakukan oleh pemerintah	36	24	14	74
		48,6%	32,4%	18,9%	100,0%
2	Apakah bapak /ibu setuju bahwa pengembangan dan penataan akan mempengaruhi jumlah pembeli makin turut meningkat	16	34	24	74
		21,6%	45,9%	32,4%	100,0%
3	Apakah dengan dilakukannya pengembangan dan penataan pasar akan memudahkan masyarakat untuk berbelanja	37	21	16	74
		50,0%	28,4%	21,6%	100,0%
4	Apakah dengan dilakukannya pengembangan dan penataan pasar akan memudahkan masyarakat untuk berbelanja	52	16	6	74
		70,3%	21,6%	8,1%	100,0%
5	Apakah jika dengan dilakukannya pengembangan dan penataan nantinya keindahan dan keteraturan pasar akan terlihat	68	6	0	74
		91,9%	8,1%	0,00%	100,0%
6	lamanya menempati pasar pagi arengka sudah lebih dari 1 tahun	73	4	0	74
		98,6%	5,4%	0,00%	100,0%
7	setujukah bapak/ibu bahwa masyarakat ramai berbelanja di Pasar Arengka ini	46	25	3	74
		62,2%	33,8%	4,1%	100,0%

8	Apakah bapak/ibu setuju bahwa masyarakat lebih sering membeli pada pedagang kaki lima yang ada di depan Pasar Pagi Arengka ini	53	21	0	74
		71,6%	28,4%	0,00%	100,0%
9	Apakah bapak/ibu setuju bahwa keteraturan pasar akan turut berpengaruh dengan pendapatan penjualan	39	21	14	74
		52,7%	28,4%	18,9%	100,0%
10	Apakah bapak/ibu setuju bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah selama ini telah mencukupi	7	47	20	74
		9,5%	63,5%	27,0%	100,0%
11	apakah bapak/ibu setuju bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan kepada pedagang untuk melakukan pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka	11	47	16	74
		14,9%	63,5%	21,6%	100,0%
12	Apakah bapak/ibu setuju bahwa pemerintah daerah mempunyai keinginan untuk melakukan pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka	35	27	12	74
		47,3%	36,5%	16,2%	100,0%
13	Apakah bapak/ibu setuju apabila pemerintah meningkatkan harga beli tempat untuk berjualan	0	17	57	74
		0,0%	23,0%	77,0%	100,0%
14	Apakah bapak/ibu setuju jika pemerintah meminta agar bapak/ibu pindah berjualan dari tempat sekarang ini	0	12	62	74
		0,0%	16,2%	83,8	100,0%
15	Apakah bapak/ibu mempunyai rencana untuk pindah berjualan dari tempat sekarang ini	2	14	58	74
		2,7%	18,9%	78,4%	100,0%
	Jumlah	475	336	302	1.110
	Rata-rata	32	22	20	74
	Persentase	42,8%	30,3%	27,2%	100,0%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2013.

Dari tabel V.19 tentang Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional diketahui bahwa Sebanyak 32 orang responden atau (42,8 %) responden menyatakan setuju dengan kebijakan

pemerintah, sedangkan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 22 orang responden atau (30,3 %) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 20 orang responden atau (27,2 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional namun harus dibarengi dengan beberapa persyaratan lain seperti pemberian fasilitas dan sarana pra sarana lain dalam berdagang.

2. Faktor –faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar.

Tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan penataan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru. Penulis dapat menemukan faktor-faktor penghambat penerapan kebijakan tersebut dari kesimpulan wawancara dengan para responden sebagai berikut :

1) Komunikasi

Salah satu cara untuk menciptakan keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada pedagang yang menjadi target atau sasaran kebijakan tersebut harus ditransmisikan dengan baik kepada. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang akan menyebabkan terjadinya kesimpang siuran yang juga akan sangat berdampak terhadap tujuan utama yang di harapkan Pemerintah Pekanbaru sendiri, oleh sebab itu maka dipandang perlu adanya komunikasi yang baik dan tepat kepada pihak tertentu.

Untuk melihat hasil jawaban responden tentang kelancaran penyampaian informasi kepada para pedagang tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan pedagang di Pasar Pagi Arengka di Kota Pekanbaru:

” Sejauh ini kami dari Pemerintah Daerah selalu berusaha untuk menyampaikan informasi penting yang berhubungan dengan Pedagang. Upaya ini kami lakukan agar pedagang mengetahui hak dan kewajibannya dalam berdagang dan tahu arti pentingnya menjaga ketertiban pasar”. **(Wawancara dengan Camat Marpoyan Damai, 5 Juni 2013).**

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat dapat disimpulkan bahwa informasi sudah diberikan secara rutin kepada Pedagang sesuai berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar implementasi sebuah kebijakan yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan baik dan benar. Tanpa adanya sumber daya yang baik, maka sudah dipastikan bahwa implementasi sebuah kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. Inilah salah satu alasan utama tentang pentingnya ketersediaan sumber daya khususnya sumber daya manusia.

Untuk melihat seberapa baik sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru beserta petugas lapangan yang dimilikinya, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut :

” Sumber daya yang ada pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang ada sekarang ini dirasa tidak mencukupi untuk menerapkan kebijakan tersebut, hal ini mengingat luasnya wilayah kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan petugas yang hanya beberapa orang”. **(Wawancara dengan petugas Dinas Pasar Kota Pekanbaru, 5 juni 2013).**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa jumlah sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru sangat terbatas sekali, sehingga sulit untuk dapat mengimplementasikan kebijakan pemerintah tersebut.

3) Disposisi

Disposisi yaitu sikap pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat atau motivasi psikologis untuk melaksanakan kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai motivasi dari implementor untuk mengimplementasikan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

” Biasanya dalam setiap menjalankan tugas kepada para Polisi Pamong Praja, kami selalu memberikan motivasi secara rutin kepada petugas lapangan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab ”.

(Wawancara dengan Kepala Bagian Pasar, 5 Juni 2013).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bagian Pasar dan di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa motivasi selalu diberikan oleh Dinas Pasar kepada para petugas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dilapangan.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang

standar (*Standar Operating/SOP*), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor didalam bertindak.

Untuk melihat tanggapan responden mengenai struktur organisasi dapat dilihat dari hasil wawancara dengan DPRD di Kota Pekanbaru :

” Salah satu prosedur yang kita jalankan dalam bertugas dilapangan adalah dengan menerapkan Standar Opration (SOP) agar anggota kita dapat bekerja dengan baik dan tidak berbuat semena-mena dilapangan”.
(Wawancara dengan Anggota DPRD di Kota Pekanbaru).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standar Operating/SOP*), ini menjadi pedoman bagi setiap anggota kita agar dapat dengan baik dan tidak berbuat semena-mena dilapangan dalam bertindak.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil rekapitulasi jawaban responden menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional namun harus dibarengi dengan beberapa persyaratan lain seperti pemberian fasilitas dan sarana pra sarana lain dalam berdagang.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional adalah dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dimasa yang akan datang, pemerintah daerah dan pihak terkait seperti DPRD dan Dinas Pasar bisa memberikan fasilitas kepada para pedagang serta pemberian sarana dan prasarana lainnya kepada para pedagang.

2. Diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi implelementasi kebijakan pemerintah seperti hubungan komunikasi dengan pedagang, kondisi sumber daya yang dimiliki, disposisi yang terjadi dan struktur birokrasi dapat dijalankan dengan baik.
3. Diharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak khususnya bagi para Pemrintah Daerah dan Pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis kebijaksanaan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, 2008
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: (UGM) Gajah Mada University Press, 2003
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. PT. Grasindo, Jakarta, 2002.
- Lanttimore Dkk, *Public Relations*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Malano, Herman, *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2003
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant D. *Kebijakan Publik; Formulasi, Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004
- Nugroho, Riant D. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009
- Parsons, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Perda Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2001
- Perda No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2006
- Sugiyono, *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru : Alaf Riau, 2008.
- Syafiie, Inu Kencana, dkk. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006

Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Balairung, 2003.

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. PT. Media Pressindo, Jakarta, 2004.